

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Teori Pembangunan Dunia Ketiga**

Dalam perkembangan dunia yang serba modern dan canggih ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap negara didunia ini hampir keseluruhan semuanya bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan baik dalam aspek kemajuan ekonomi, aspek kemajuan politik, aspek kemajuan sosial, aspek kemajuan lingkungan, aspek kemajuan budaya serta komponen-komponen utama lainnya yang memiliki hubungan erat pada pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini negara-negara pada hakikatnya berusaha dan bersaing dengan cara ingin membuktikan serta memperlihatkan pertumbuhan pada aspek-aspek pembangunan dalam hal ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan budaya yang jauh lebih tinggi dan berbeda dengan yang lainnya. Strategi yang dilakukan untuk membuktikan pertumbuhan pada aspek-aspek pembangunan yaitu dengan cara kerjasama, diantaranya kerjasama antar negara dengan organisasi internasional, kerjasama negara dengan negara-negara tetangga lainnya, kerjasama negara dengan (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat baik itu nasional serta internasional, kerjasama negara dengan pemerintah dalam negeri atau luar negeri. Semua kerja sama ini sudah termasuk dalam aspek-aspek diatas yang berkaitan dengan pembangunan baik itu dari segi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dalam suatu tatanan negara secara struktural dan sistematis tersebut.

Namun pada perkembangannya kemajuan suatu negara tersebut masih tetap bermula dan diukur pada tingkat angka kemiskinan dan hal itu masih menjadi masalah utama yang hingga saat ini dihadapi oleh negara-negara maju atau adidaya dan negara-negara yang berkembang atau terbelakang. Untuk menghadapi masalah utama yaitu kemiskinan, dibutuhkan suatu pembangunan berkelanjutan yang notabennya memiliki peran yang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu negara sehingga harapan dari setiap warga negara terpenuhi dan kemungkinan besar angka kemiskinan akan berkurang. Satu teori yang sesuai dengan percepatan pembangunan dan masalah kemiskinan yang dimaksudkan disini adalah teori

pembangunan dunia ketiga. Teori Pembangunan Dunia Ketiga<sup>1</sup> ini sendiri merupakan teori yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang atau terbelakang. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dan diterapkan di negara-negara dunia ketiga ini masih memiliki hubungan erat dengan sejarah *Marshall Plan* yang dipelopori oleh Amerika Serikat paska Perang Dunia II. Hal ini dikarenakan paska Perang Dunia II, banyak negara-negara kecil bekas jajahan kolonial yang muncul dan merdeka seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara yang baru muncul dan merdeka ini yang disebut sebagai negara dunia ketiga. Kemudian mereka (Negara Dunia Ketiga) ini pada masa itu sedang berusaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya dan mencari model-model pembangunan yang sesuai lalu hendak digunakan sebagai acuan untuk membangun tingkat perekonomian di negara mereka masing-masing.

Dengan perspektif demikian secara umum, negara-negara dunia ketiga ketika melakukan percepatan pembangunan memiliki tujuan agar terhindar dari ancaman kemiskinan untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan badan-badan yang punya andil termasuk penggunaan kewenangan monopoli agar melakukan serta melaksanakan aturan atau kebijakan yang struktural dan sistematis. Berikut merupakan lima (5) faktor pendukung yang digunakan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik menurut buku Arif Budiman dalam Teori Pembangunan Dunia Ketiga;

### **1. Kekayaan Rata-Rata**

Pertumbuhan ekonomi merupakan permulaan yang paling awal dilakukan oleh Negara Dunia Ketiga. Suatu negara dinilai berhasil jika masyarakat atau warga negaranya mulai mengerti, memahami dan melakukan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dengan cukup tinggi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat di negara tersebut dapat diukur dengan produktivitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut tiap tahunnya. Produktivitas ini diukur menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk

---

<sup>1</sup> Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. anggota IKAPI. Diakses tanggal 16 Juli 2019

Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PNB/GNP merupakan barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama satu tahun dan PDB/GDP merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan.<sup>2</sup>

## 2. Pemerataan

Pemerataan merupakan tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan upaya pembagian hasil yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain atau kelompok lain secara rata (tidak memihak). Dalam konteks negara dunia ketiga ini pemerataan yang dimaksudkan adalah dalam hal memiliki sumber atau seluruh kekayaan yang didapatkan dan diproduksi oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa seluruh kekayaan tersebut dibagi merata dan dimiliki oleh semua penduduknya. Maka dari itu bukan lagi hanya PNB/kapita saja yang digunakan dalam mengukur pembangunan melainkan timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pemerataan dalam metode ini, secara sederhana dapat dengan jelas melihat berapa persen dari PNB yang diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya.

Kekayaan atau produktivitas suatu bangsa beserta pemerataan kekayaannya tersebut dapat dilihat bila pembangunan satu bangsa diukur dengan PNB/kapita dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya karena dari situ mendapatkan gambaran yang lebih majemuk. Namun pada kenyataannya tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB/kapita berhasil juga dalam pemeratakan hasil-hasil pembangunan, dan begitu juga dengan sebaliknya dimana ketika suatu negara berhasil pemeratakan hasil-hasil pembangunan berhasil juga meningkatkan PNB/kapita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika suatu negara berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi produktifitasnya, juga penduduknya makmur dan sejahtera secara merata.

---

<sup>2</sup> Ibid. Diakses tanggal 20 September 2019

### **3. Kualitas Kehidupan**

Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk pada sebuah Negara adalah dengan menggunakan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur PQLI ini diperkenalkan oleh Moris menggunakan 3 indikator yakni (1) rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun (2) rata-rata jumlah kematian bayi, dan (3) rata-rata presentasi buta huruf. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tolok ukur PQLI ini mengalami banyak masalah karena sebenarnya masih banyak indikator yang bisa dimasukkan ke dalam indeks PQLI ini.<sup>3</sup>

### **4. Kerusakan Lingkungan**

Selain kualitas kehidupan untuk mengukur kesejahteraan penduduk dan pemerataan kekayaan rata-rata yang masuk dalam keberhasilan pembangunan yang paling baru, kerusakan lingkungan juga merupakan kriteria yang paling menentukan dialaminya. Dapat dikatakan demikian dikarenakan apa gunanya teknologi yang modern disertai peningkatan produktivitasnya, merata pembagiannya, tetapi tidak dapat mempertahankan kelestarian lingkungannya. Misalnya karena percepatan pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak negatif terhadap lingkungan atau alam di negara tersebut. Seperti pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam dan mengganggu kesehatan penduduk dinegara tersebut beserta makhluk hidup di sekitarnya

Seluruh kekayaan sumber daya alam yang terkuras habis sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dan sedang bersusah payah beradaptasi dengan sampah-sampah pabrik yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Maka sangat patut diasumsikan bahwa untuk menyediakan semua itu dibutuhkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam (makhluk hidup) sebagai faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi.

---

<sup>3</sup> Ibid. Diakses tanggal 20 September 2019

## **5. Keadilan Sosial dan Kestinambungan**

Sebenarnya, faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Keadilan sosial, bukanlah faktor yang dimasukkan atas dasar pertimbangan moral yaitu demi keadilan saja. Tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis dan orang-orang miskin akan lebih cenderung untuk menolak status quo yang ada. Pada akhirnya bagaimanapun juga pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusianya. Hal ini dikarenakan pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang dihasilkan dan akan dibagi rata. Kedua, faktor pengambilan inisiatif yang menjadi masalah utama manusia pembangunan.<sup>4</sup>

### **2.2 Konsep SDG's (Pembangunan Berkelanjutan)**

#### **2.2.1 SDG's Tanpa Kemiskinan**

Strategi menghapus segala bentuk kemiskinan :

1. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan system jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal.
- 4.

---

<sup>4</sup> Ibid. Diakses tanggal 20 September 2019

## **2.2.2 SDG's Tanpa Kelaparan**

Strategi mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan :

1. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri
2. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
4. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.<sup>5</sup>

## **2.2.3 SDG's Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Strategi menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia :

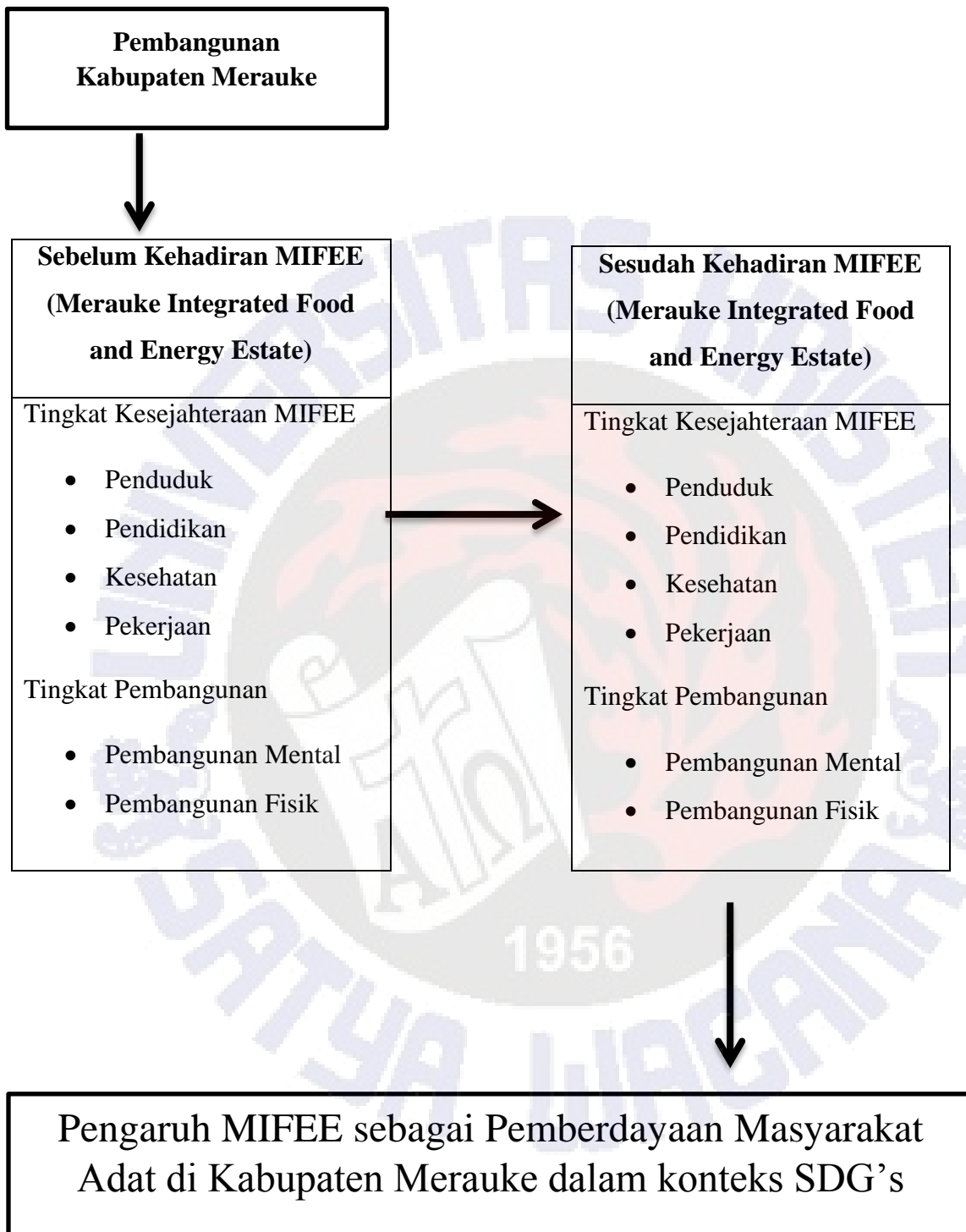
1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.
6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
7. Meningkatkan keterseediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
9. Memperkuat manajemen, penelitian pengembangan dan system informasi
10. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>[http://www.google.com/ur?sa=t&source=web&rct=i&url=http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/STRATEGI\\_PEN\\_CAPAIAN\\_TARGET\\_DAN\\_INDIKATOR\\_SDGs.docx&ved=2ahUKewi6jKKI4rvIAhUbf30KHX4N](http://www.google.com/ur?sa=t&source=web&rct=i&url=http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/STRATEGI_PEN_CAPAIAN_TARGET_DAN_INDIKATOR_SDGs.docx&ved=2ahUKewi6jKKI4rvIAhUbf30KHX4N). Diakses tanggal 27 Oktober 2019

<sup>6</sup> Ibid. Diakses tanggal 27 Oktober 2019

### 2.3 Kerangka Berpikir



## 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>R.Yando Zakaria dkk. 2011. <i>MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind</i>. Jakarta: Yayasan PUSAKA.</p>	<p>Secara keseluruhan penelitian menyimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal ini MIFEE ditempatkan sebagai suatu hasil dari proses kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di bimbing oleh paham neoliberalisme dalam menghadapi krisis yang tercipta akibat kekurangan produksi. Paham neoliberalisme yang dimaksud dipahami sebagai paham yang mendefinisikan fungsi “Pemerintah hanya berfungsi sebagai “penjaga malam” yang mengatur bagaimana transaksi berlangsung”.</li> <li>• Konsekuensinya, ketersediaan pangan dan energi diserahkan di mekanisme pasar. Berangkat dari pemahaman demikian, MIFEE memang disebut sebagai solusi atas “krisis kekurangan produksi” namun di sisi lain MIFEE juga memang masih merupakan sebuah program pembangunan yang berada di luar jangkauan orang-orang Malind yang tinggal di wilayah itu “MIFEE : Tak Terjangkau Angan Malind” sesuai judul buku yang mencerminkan betul nasib suku Malind.</li> </ul>
2	<p>Pemerintah Pusat Menteri</p>	<p>Secara keseluruhan penelitian menyimpulkan bahwa :</p>



	<p>Pertanian (Suswono) dan Pemerintah Daerah Bupati Merauke (Johanes Glube Gebze), Jakarta bulan Juni 2010, <i>“Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food and Energy Estate) di Merauke Papua.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana tindak lanjut ini datang dari aksi pengembangan lahan pangan skala luas yang ramah lingkungan dan tidak merusak pranata sosial setempat, sesuai dengan Inpres No.1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010, dimana telah disusun Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food and Energy Estate) di Merauke.</li> <li>• Dokumen Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food and Energy Estate) di Merauke yang di dalamnya mencangkup tujuan, sasaran, desain, kebijakan, serta indicator keberhasilan dalam pengembangan pangan dan energy secara luas di Merauke.</li> <li>• Di dalam buku ini juga mengharapkan bahwa dengan adanya Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food and Energy Estate) di Merauke ini dapat menjadi acuan bagi pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam berpartisipasi aktif sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing pada pelaksanaan program kegiatan tersebut.</li> </ul>
3	<p>Rosita Dewi, 2016, <i>Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke</i>, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusus telah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan Inpres No 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu</li> </ul>

	(LIPI)	<p>paket program dalam Inpres tersebut adalah MIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problem kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dan kepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di atas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampak dari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat Papua.</p>
4	<p>Tomi Setiawan, 2017, <i>Peran Administrasi Negara Dalam Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi “Ethnodevelopment : Solusi Atas Kegagalan Kebijakan Pembangunan Kapitalistik Pada Masyarakat Adat”</i>, Pusat Studi Kebijakan Agraria Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.</p>	<p>Penelitian ini secara keseluruhan merupakan studi literatur atas kegagalan kebijakan pembangunan kapitalistik pada masyarakat adat dengan mode ekspansi kapital, khususnya pada proyek MIFEE. Secara umum, MIFEE digambarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai rencana perkebunan raksasa yang akan menjadikan padi sebagai plantasi utamanya. Sebagai entitas budaya yang memiliki ketergantungan lebih besar pada hutan, suku Malind Anim adalah korban proyek raksasa tersebut. Secara konseptual <i>ethnodevelopment</i> telah digunakan sebagai pengakuan atas kebutuhan untuk mengeliminasi semua bentuk diskriminasi rasial, <i>ethnosida</i> dan sisa-sisa kolonialisme. Dalam aksiologinya, sebuah pembangunan sejati adalah proses yang mewakili visi</p>

		<p>masyarakat otonom tentang sejarah, nilai, dan tujuannya untuk masa depan karena ia mencari kualitas kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks <i>self-development</i>, pembangunan untuk masyarakat adat bukanlah alternatif generik untuk paradigmatik utama seperti perkembangan kapitalistik arus utama. Hal itu hanyalah bagian dari pernyataan hak untuk menentukan nasib sendiri dan tetap menjadi budaya dan komunitas yang beragam dan berbeda. Simpulan studi ini adalah bahwa kasus proyek MIFEE yang telah menghasilkan etnosida masyarakat adat Malind Anim dapat menjadi contoh penting bagi para pemula dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan <i>ethnodevelopment</i> atau self-development pada tingkat lokal di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, proyek MIFEE harus <i>dimoratorium</i> serta kemudian dilakukan evaluasi terhadap proyek yang memiliki kerusakan yang berdampak pada ekologi dan etnologi kepada masyarakat adat ini.</p>
5	<p>Wulansari, 2017, <i>Paradoks Dalam Kemiskinan Struktural di Papua</i>, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Universitas Negeri Malang</p>	<p>Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk melihat kemiskinan struktural di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur tentang Papua, dimulai dengan pemeriksaan terhadap kebijakan pembangunan untuk Papua sejak era Orde Baru hingga saat ini. Berdasarkan temuan, ada kesamaan paradigma pembangunan Papua pada masa orde baru dan era reformasi. Papua dianggap tak lebih sebagai objek pembangunan. Hal ini terbukti dengan adanya operasi perusahaan tambang multinasional yang</p>

		<p>mengarah ke beberapa kekerasan terhadap orang Papua yang disebabkan oleh pendekatan militer yang digunakan oleh pemerintah. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua menjanjikan pembangunan yang dipercepat. Namun, di tengah-tengah pelaksanaan otonomi khusus yang gagal, pemerintah memberlakukan paradigma lain yang menyerahkan kebijakan pembangunan pengelolaan pangan dan energi kepada pihak swasta melalui proyek-proyek besar bernama MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). MIFEE menawarkan beberapa mimpi kosong dengan dalih untuk membangun makanan Indonesia kepada dunia. Bahkan, kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk mendukung kehidupan orang Papua. Oleh karena itu, kemiskinan di Papua semakin akut karena kebijakan pemerintah atas nama pembangunan ekonomi kurang aspek sosial</p>
--	--	---

6	<p>Y.L. Franky, 2018, Hutan Sumber Kehidupan Kami, Bukan Kelapa Sawit, Awas MIFEE! Tracking the Merauke Integrated Food and Energy Estate.</p>	<p>Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proyek MIFEE merupakan program ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan pertama kali melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Presiden SBY meminta Menteri Pertanian RI untuk melaksanakan kebijakan Peningkatan Investasi Pangan melalui Program Fasilitas Investasi Pangan dan tindakan penyusunan kebijakan food estate. Selain itu, Presiden SBY menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Papua untuk Penetapan Tata Ruang Kawasan Merauke guna mendukung peningkatan investasi pertanian dan penyediaan lahan pangan.</li> <li>▪ Latar belakang proyek MIFEE juga masih terkait dengan agenda lokal, yakni proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat setempat,</li> </ul>

		<p>agenda nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan pangan nasional, serta agenda global berhubungan dengan meningkatnya permintaan pasar dunia untuk pangan dan energi, menyusul terjadinya krisis pangan dan energi dunia. Krisis tersebut dianggap sebagai peluang untuk meraup keuntungan dari bisnis pangan dan energi.</p>
--	--	---

